



Media: Kompas

Hari: Selasa

Tanggal: 28 Desember 2010

Halaman: B

Pajak Daerah Rp 77,8 Miliar

Kembalikan Pajak Semestinya

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pendapatan Kota Yogyakarta dari pajak daerah sejak Januari hingga empat hari menjelang tutup tahun 2010 mencapai Rp 77,8 miliar. Jumlah itu melampaui target pajak daerah pada APBD Kota Yogyakarta 2010 sebesar Rp 75,2 miliar.

"Pendapatan dari pajak daerah hingga hari ini (kemarin) telah mencapai 103,56 persen dari target," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Rr Titik Sulastri di kantornya, Senin (27/12). Secara keseluruhan, pajak daerah berkontribusi 9,51 persen dari total pendapatan Yogyakarta tahun 2010 sebesar Rp 818,05 miliar.

Terdapat enam komponen pajak daerah yang dipungut lang-

sung pemkot, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, dan parkir. Hotel menyumbang terbesar, yakni Rp 32,4 miliar atau 41,6 persen. Diikuti pajak penerangan jalan (Rp 23,3 miliar) dan pajak reklame (Rp 4,5 miliar).

Dari keenam jenis pajak itu, hanya pajak reklame yang tak memenuhi target pencapaian, hanya 87,6 persen dari target Rp 5,1 miliar. "Ini karena reklame

lebih bersifat insidental, bergantung banyak tidaknya event di Yogyakarta. Apalagi, hal itu sempat terganggu akibat dampak erupsi Merapi," katanya.

Erupsi Merapi sempat membuat anjlok penerimaan pajak hotel pada bulan November karena berkurangnya jumlah wisatawan. "Pada November 2009, pajak hotel Rp 2,9 miliar. Sementara November kemarin hanya Rp 1,3 miliar saja," katanya.

Namun, lanjut Titik, hal itu tidak sampai memengaruhi keseluruhan penghasilan pajak secara signifikan. "Kalau (erupsi) terjadi pada awal atau pertengahan tahun, mungkin bisa memengaruhi penerimaan pajak. Seperti bencana gempa bumi 2006 lalu," katanya.

Prediksi 2011
 Pada 2011, penerimaan pajak Kota Yogyakarta kemungkinan bertambah mengingat ada pajak yang dialihkan dari pemerintah pusat dan provinsi, yakni pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. "Ada pula pungutan pajak baru, yakni pajak sarang burung walet, yang akan mulai diterapkan pada tahun depan," ujar Titik.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Yogyakarta Istdjab M Danunagoro berharap, kontribusi pajak yang besar dari pengusaha hotel dan restoran itu bisa dikembalikan dalam berbagai bentuk kebijakan dan insentif yang mendukung sektor itu.

Misalnya, Istdjab menyarankan, 10 persen dari kontribusi pajak hotel dan restoran itu dialokasikan untuk promosi dan pemasaran pariwisata Yogyakarta guna mendatangkan lebih banyak wisatawan. "Jika turis banyak datang, usaha hotel dan restoran akan bisa menyumbang pajak lebih besar lagi. Apalagi, bisnis hotel saat ini masih belum pulih 100 persen dari dampak erupsi Merapi," katanya.

Selain itu, General Manager Grand Quality Hotel tersebut juga berharap pemasukan pajak bisa dialokasikan untuk pengembangan obyek-obyek wisata di Yogyakarta. "Misalnya, dana dipakai untuk menata Malioboro agar lebih cantik dan menarik minat wisatawan datang," katanya. (ENG)

an Kepada Yth. :
 Walikota Yogyakarta
 Wakil Walikota Yogyakarta
 Sekretaris Daerah
 sisten
 an Kepada Yth. :
 Instansi
 Tindak Lanjut

Negatif Amat Segera Untuk ditangga

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005